

PENDIDIKAN BERWAWASAN KEBANGSAAN DAN KEMANDIRIAN EKONOMI SEBAGAI JAWABAN TERHADAP TANTANGAN MASA DEPAN INDONESIA

Wahyono S.K. *)

Ketika krisis melanda negara kita, yang diguncang tidak hanya ekonomi kita, tetapi juga rasa kebangsaan kita. Konflik antaretnik antaragama, antarkelompok masyarakat, bahkan separatisme merebak. Rasa kebangsaan menipis, persatuan bangsa retak, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia pun memudar.

Bangsa Indonesia yang diikrarkan para pemuda di tahun 1928 dan diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, serta dibela dengan darah dan jiwa para pemuda melawan Jepang, Inggris dan Belanda, mulai tercabik-cabik. Banyak generasi muda sekarang yang tidak pernah melihat foto bersejarah pengibaran bendera Sang Merah Putih yang pertama kali oleh seorang prajurit dan seorang pemuda disaksikan kedua proklamator kemerdekaan Sukarno dan Hatta serta sejumlah pemuda-pemudi perintis dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Gambar foto itu adalah bukti bahwa bangsa Indonesia itu ada karena para pemudanya dan

akan terus berjaya karena dibela para pemudanya dari generasi ke generasi.

Ketika negara Indonesia berdiri dan terhampar luas dari Sabang sampai Merauke dan menjadi penghubung antara Samudera Pasifik dan Samudera India, maka dunia menyadari bahwa negara Indonesia akan mempunyai pengaruh yang besar bagi kelancaran jalan laut perhubungan mereka. Sejak itu pula mereka mulai berebut pengaruh di Indonesia. Mereka tidak ingin melihat Indonesia besar.

Mereka tidak ingin melihat Indonesia kuat. Setiap saat kita lengah mereka masuk (*Pacific Affairs*, 1985 dan Dokumen CIA 1964-1966).

*) Wahyono S.K., Ph.D., Pemimpin Umum Majalah *Telstra Lemhannas* Jakarta.

Masalah yang sekarang kita hadapi adalah memulihkan rasa kebangsaan dan sekaligus ekonomi yang harus mandiri untuk menghadapi gelombang globalisasi dan sekaligus mengangkat harkat dan martabat bangsa, memperteguh rasa kebangsaan.

Rasa Kebangsaan yang Menipis

Ada tiga unsur yang harus kita cermati demi kelangsungan hidup bangsa dan negara, yaitu pertama unsur bangsa, kedua unsur ruang hidup atau wilayah dan ketiga unsur konsepsi ruang. Unsur bangsa adalah 215 juta lebih rakyat yang multi kultural. Unsur ruang hidup adalah wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke terdiri atas lebih dari 17.000 pulau yang membentuk sebuah Negara Kepulauan. Sedang unsur konsepsi ruang atau *space conception* kita adalah Wawasan Nusantara. Ketiga unsur itu saling berkait dan harus selalu dipelihara keutuhannya demi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ketiga unsur itu dalam kehidupan sosial-politik membentuk wawasan kebangsaan. Penghayatan terhadap wawasan kebangsaan dalam kehidupan akan menumbuhkan rasa kebangsaan. Wawasan dan rasa kebangsaan yang kokoh akan mam-

pu menghadapi setiap bahaya yang mengancam.

Wawasan kebangsaan melahirkan lambang-lambang bangsa dan negara seperti bendera, lagu kebangsaan, lambang negara, ideologi negara dan tentara. Lambang-lambang itu membentuk citra bangsa. Penghormatan terhadap lambang-lambang itu menumbuhkan kebanggaan sebagai satu bangsa yang merdeka dan berdaulat, yang mempunyai nilai-nilai tertentu yang menggambarkan jati diri bangsa itu dan sekaligus sebagai perekat keutuhan bangsa itu.

Kebencian terhadap suatu bangsa sering ditunjukkan dengan menyerang salah satu lambangnya, seperti membakar bendera, menyerang ideologi atau kalau tujuannya untuk menguasai, maka yang diserang adalah tentaranya. Tentara adalah pertahanan terdepan, kalau bisa dihancurkan, maka negara itu akan mudah dikuasai. Hanya musuh negara yang ingin menghancurkan tentara.

Neo-imperialisme dan Neokapitalisme

Kebutuhan hidup suatu bangsa cenderung akan melampaui batas negaranya, maka bangsa-bangsa menjalin hubungan untuk saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Namun demiki-

an ada juga kecenderungan bangsa-bangsa itu untuk memaksakan kehendaknya terhadap bangsa yang lain, terutama bangsa-bangsa yang merasa lebih besar dan lebih kuat, terhadap bangsa-bangsa yang lebih lemah.

Di masa yang lalu kehendak itu diwujudkan melalui perang, meskipun cara-cara penggunaan kekerasan perang itu sampai sekarang masih juga dilaksanakan, seperti AS dan sekutunya terhadap Afganistan dan Irak, tetapi umumnya dilakukan dengan cara damai melalui penyebaran pengaruh politik, ekonomi dan sosial-budaya. Kepentingan negara-negara besar untuk menguasai negara-negara kecil dalam dekade terakhir ini dicapai melalui penyebaran ide-ide demokratisasi, liberalisasi, pasar bebas, globalisasi, negara tanpa batas dan matinya negara bangsa.

Ketika ide-ide yang "maju" itu masuk di kalangan muda bangsa, berkembang persepsi bahwa keterbelakangan bangsanya adalah karena nilai-nilai dasar bangsanya telah usang dan tidak cocok lagi dengan kemajuan jaman, maka harus diganti dengan nilai-nilai negara maju. Secara ekstrim, bangsa itu untuk maju harus dicabut dari akarnya dan dicangkokkan pada pohon bangsa-bangsa maju.

Di saat itulah rasa kebangsaan itu luntur, terlebih lagi apabila apa-apa yang terkait dengan sejarah masa lalu bangsa harus dibuang dan diganti baru. Tidak ada lagi kebanggaan pada bangsa sendiri. Tidak ada lagi penghormatan terhadap nilai-nilai luhur budaya sendiri. Tidak ada lagi penghargaan terhadap sejarah masa lalu bangsa. Inginnya potong satu-dua atau tiga generasi sekaligus dan memulai sejarah yang baru. Apakah sejarah mungkin dipotong?

Ide-ide baru negara-negara besar itu, yang sesungguhnya adalah pasukan pendobrak negara-negara besar itu untuk melancarkan jalan bagi masuknya neoimperialisme dan neokapitalisme ke negara-negara kecil, tidak hanya untuk menggoyahkan rasa kebangsaan, tetapi juga mengecilkan persepsi tentang konsepsi ruang dan ruang hidup bangsa itu. Dari ide-ide itu akan tumbuh subur gagasan federalisme dan separatisme, karena merasa tidak lagi terikat sebagai satu bangsa. Di Eropa yang terjadi adalah runtuhnya imperium Uni Soviet dan Yugoslavia, yang runtuh dari negara besar menjadi berkeping-keping. Di Indonesia adalah lepasnya dengan mudah Timor Timur dan Sipadan-Ligitan. Semua itu bermula dari persepsi tentang konsepsi ruang yang menciut.

Kita jangan terlena terhadap jargon-jargon negara-negara maju itu, karena di balik janji demokratisasi itu ternyata ada *invasion, military intervention* dan *government overthrow*. Di balik liberalisasi ada demoralisasi kehidupan, ada pelecehan agama, ada perusakan nilai-nilai keluarga. Di balik pasar bebas ada pembatasan ekspor bagi negara-negara kecil ke negara-negara besar, ada pemberian hutang yang sulit dikembalikan sehingga akan terus terjadi ketergantungan, ada privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan negara yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk dimiliki perusahaan-perusahaan multinasional. Itu semua hanyalah keserakahan kapitalisme atau *capitalism greed* untuk menguasai dunia.

Semangat Bela Negara

Apakah bangsa Indonesia sudah tidak ada? Apakah konsepsi ruang bangsa Indonesia sudah tidak lagi mencakup Sabang sampai Merauke? Ke mana rasa cinta tanah air kita? Ke mana rasa tanggung jawab kita terhadap keselamatan, kelangsungan hidup, dan masa depan bangsa Indonesia?

Semua pertanyaan itu yang semula hanya muncul dalam pikiran, tidak mustahil akan menjadi kenyataan, apabila kita kehilangan wawasan dan rasa ke-

bangsaan kita. Kita tidak boleh *take it for granted* bahwa wawasan dan rasa kebangsaan itu akan selalu ada, khususnya di kalangan generasi muda bangsa.

Nation building adalah suatu proses yang tidak pernah berakhir. AS saja memulai penanaman rasa kebangsaannya dengan mengharuskan anak-anak sekolah menghormat bendera di kelas setiap pagi.

Kita perlukan kesadaran berbangsa itu, karena keselamatan, kelangsungan hidup, dan masa depan bangsa adalah tanggung jawab seluruh bangsa. Oleh karena itu *para founding fathers* kita merumuskan dalam pasal 30 UUD 45 kita yang asli, bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara". Bela negara dalam arti luas tidak hanya menjadi hak, yang boleh dipakai atau tidak, tetapi suatu kewajiban, suatu keharusan yang menjadi tanggung jawab setiap warga negara. Kata-kata "wajib ikut serta" jangan dipisah, karena kata-kata itu tidak berarti kewajiban, tetapi keharusan, kecuali bagi yang tidak mampu. Pembelaan terhadap negara tidak semata-mata hanya ancaman terhadap pertahanan dan keamanan, tetapi juga terhadap politik ekonomi dan sosial-budaya bangsa.

Menghadapi ancaman yang

bersifat multi dimensi, yang datang dari mana saja, baik dari luar maupun dari dalam, yang membahayakan keselamatan, kelangsungan hidup, dan masa depan bangsa, adalah tanggung jawab setiap warga bangsa Indonesia, tua-muda, kaya-miskin, laki-laki-perempuan, tentara-pemuda.

Kita semua harus waspada terhadap kepentingan-kepentingan negara-negara besar dan kapitalis-kapitalis global yang ingin menguasai negara kita melalui isu-isu demokratisasi, liberalisasi, pasar bebas, globalisasi, negara tanpa batas dan matinya negara bangsa.

Tiang penyangga bangsa dan negara adalah tentara dan pemuda. Bangsa dan negara akan runtuh apabila tentaranya hancur dan pemudanya lemah. Tentara dan pemuda adalah satu generasi yang dapat saling tukar tempat dan tidak harus terpisah. Oleh karena itu kita senantiasa harus membina tentara dan pemuda untuk kokoh dan bersatu, agar tidak mudah diadu domba oleh musuh yang tidak menginginkan kita menjadi besar dan maju.

Kita semua bertanggung jawab terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Tentara dan pemuda harus bahu-membahu bergandeng tangan melawan semua pengaruh dan an-

caman yang merugikan masa depan bangsa Indonesia. Kita merindukan semangat kerja sama tentara dan pemuda seperti yang ditunjukkan dalam gambar bersejarah pengibaran bendera Sang Merah Putih oleh seorang prajurit dan seorang pemuda pada saat selesai diucapkan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945.

Kondisi Ekonomi Yang Masih Buruk

Di samping menipisnya rasa kebangsaan kita saat ini juga dihadapkan pada kenyataan kondisi ekonomi yang masih buruk. Laporan tentang *Human Development Report 2004* yang diterbitkan *The United Nations Development Programme* (UNDP) menempatkan Indonesia pada posisi ke-111 dari 177 negara yang dilaporkan peringkat *human development index-nya*. Posisi itu termasuk dalam kelompok *medium human development*, yaitu dari posisi 56 (Bulgaria) sampai 141 (Cameroon). Sebagai gambaran posisi teratas, yaitu nomor 1 diduduki Norwegia, selanjutnya untuk negara-negara ASEAN antara lain, Singapore di posisi 25, Brunai Darussalam 33, Malaysia 59, Thailand 76, Philipines 83 dan seterusnya.

Posisi Indonesia memang tidak terlalu tinggi. Ini menunjukkan bahwa Indonesia saat ini (data tahun 2002) masih termasuk negara yang miskin dan terbelakang. Keadaan diperparah dengan adanya kesenjangan sosial ekonomi antara yang kaya dan yang miskin, antara kota-kota dan desa-desa.

Dalam laporan UNDP itu 30% golongan menengah ke atas Indonesia menikmati 71,8% pendapatan nasional, sedangkan rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan jumlahnya mencapai 27,1%, dan yang bekerja dengan upah dolar AS DAS 2 sehari mencapai 52,4%. Di samping itu juga dilaporkan yang menderita kekurangan gizi 6%, sedangkan jumlah kematian bayi saat kelahiran 33 anak per 1000 kelahiran, kematian balita 45 dari 1000 yang hidup, dan kematian ibu pada persalinan 230 per 100.000 persalinan.

Semua itu adalah data untuk negara yang tergolong miskin dan terbelakang, maka data tersebut dapat menunjukkan tingkat kemiskinan dan keterbelakangan Indonesia pada saat laporan itu dibuat. Apa artinya data itu kalau tidak segera kita atasi tidak lain bahwa kita akan menghadapi kenyataan meningkatnya kematian ibu bersalin, kematian balita, kematian orang-orang miskin, peningkat-

an pengangguran, peningkatan gelandangan.

Menghadapi Gelombang Globalisasi

Angka-angka statistik tersebut di atas adalah tantangan yang harus kita tembus dalam waktu yang tidak terlalu lama, dengan sendirinya dengan usaha yang sungguh-sungguh dan kerja yang keras. Diperlukan pemberdayaan rakyat dan ekonominya melalui pendidikan dan pembangunan. Tantangan untuk pembangunan ekonomi saat ini sangat berat, di satu sisi kita harus menghidupkan ekonomi domestik tapi di sisi yang lain kita harus siap menghadapi gelombang globalisasi yang dilancarkan raksasa-raksasa ekonomi dunia.

Dalam keadaan normal ekonomi domestik akan lebih mudah digerakkan apabila ada bantuan investasi atau pinjaman modal dari luar negeri, tetapi dalam situasi ekonomi dunia saat ini yang menghadapi tekanan perusahaan-perusahaan dan pemodal-pemodal raksasa yang ingin menguasai pasar dunia, maka bantuan luar negeri itu justru cenderung akan memperlemah ekonomi domestik. Bantuan IMF, World Bank dan Asian Development Bank dalam menangani krisis moneter Indonesia

tahun 1997 justru membuat ekonomi Indonesia hancur.

Bangsa Indonesia harus mampu membangun kembali ekonominya dengan mengandalkan kekuatan sendiri, melalui pemberdayaan kekuatan rakyat dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alamnya dengan cermat. Semangat mengubah nasib bangsa dengan kekuatan sendiri harus terus dikobarkan, apalagi kita menghadapi dunia yang tidak lagi bersahabat, tetapi semuanya mencari keuntungan untuk diri sendiri. Kita harus mencontoh Korea Selatan dan Taiwan yang justru bangkit setelah bantuan AS dihentikan tahun 1965 (Melvyn B. Krauss, *Development Without Aid*, 1983).

Para ahli ekonomi banyak yang tidak sependapat dengan semangat berdikari ini, karena mereka melihat hanya modal yang dapat menggerakkan pertumbuhan. Mereka tidak memahami bahwa perusahaan-perusahaan dan modal-modal raksasa itu masuk ke negara-negara berkembang bukan dengan tujuan untuk membantu negara-negara berkembang itu memajukan ekonominya, melainkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada menanamkan modalnya di negerinya sendiri. Itulah sebabnya mengapa mereka melalui berbagai media dan organisasi internasional

seperti IMF dan WTO mendorong terjadinya globalisasi ekonomi yang memungkinkan tumbuhnya perdagangan bebas, pasar bebas dan *free movement of capital*. (Noreena Hertz, *The Silent Take Over*, 2001).

Ekonomi dunia sekarang dikuasai beberapa negara besar sebagai hasil dari akumulasi modal bertahun-tahun yang diperoleh dari kolonialisme dan imperialisme masa lalu. Negara-negara itu oleh George Soros (*Open Society*, 2002) disebut *The Center States* yang terdiri atas Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis dan Jepang, sedangkan negara-negara berkembang yang umumnya hidup bergantung dari *The Center States* disebut *The Periphery States*, termasuk di dalamnya Indonesia. Menurut George Soros hubungan antara *The Center* dan *The Periphery* itu bersifat *assymetric*, karena "*The center is the provider of capital, the periphery is the user of capital - The center's most important feature is that it control its own economic policies and holds in its hands the economic destinies of periphery countries*".

Data terakhir yang dilaporkan oleh Raymond Baker dan Jennifer Nordin dari *Center for International Policy*, Washington (*Financial Times*, 13 Oktober 2004), setiap DA\$ 1,- yang masuk ke negara berkembang akan meng-

alir kembali ke negara pemberi modal sebesar DAS 10,-. Khusus tentang Indonesia dilaporkan yang masuk dari World Bank dan IMF dari tahun 1970 sampai 2002 mencapai DAS 232,- milyar, juga dilaporkan bahwa daripadanya DAS 35, milyar hilang atau dikorup dan yang kembali disedot ke kedua lembaga itu dan ke perusahaan-perusahaan raksasa dunia bisa mencapai sepuluh kali dari pinjaman itu.

Berhutang atau Berdagang

Ada perbedaan pandangan antara seorang ahli ekonomi dengan seorang wirausaha, para ahli ekonomi selalu menekankan perlunya modal untuk mendapatkan pertumbuhan, sedangkan para wirausaha berpendapat bahwa keuntungan tidak diciptakan oleh modal tapi oleh *entrepreneurship*. Itulah sebabnya mengapa para ahli ekonomi selalu berusaha keras untuk memasukkan modal asing atau bahkan menambah hutang, sedangkan para wirausaha lebih mengandalkan peningkatan perdagangan dengan kemampuan yang dimiliki, karena sesungguhnya *trade is the engine of growth*. Perdaganganlah yang membuat negara-negara besar itu kaya, memupuk modal dan menjadi *super power* yang sekarang menguasai dunia.

Tugas pemerintah adalah memberikan kemudahan berusaha, menyediakan tempat usaha seluas-luasnya, menyediakan informasi pasar yang terus di-*update*, menyediakan tenaga penyuluhan, serta yang lebih utama memberantas pemungut dan pungutan liar. Prasarana dan sarana transportasi dari desa ke kota, antarkota dan antarpulau harus tersedia secara permanen dan reguler. Demikian pula prasarana dan sarana listrik dan telekomunikasi.

Pemerintah harus mendorong bangsa ini menjadi *a trading nation*, dengan menggerakkan perdagangan desa dengan kota, antarkota dan antarpulau, dan kemudian dengan dunia dengan menggerakkan perdagangan lewat laut (*seaborne trade*) dan industri pantai (*waterfront industries*) sepanjang alur pelayaran utama.

Selanjutnya berdasarkan arah arus barang dan manusia, pemerintah menetapkan beberapa kota besar sebagai pusat-pusat kegiatan ekonomi yang proporsional dari Sabang sampai Merauke dan melengkapinya dengan lembaga-lembaga perdagangan dan keuangan. Kota-kota besar itu selain merupakan pusat-pusat kegiatan ekonomi, juga akan merupakan tiang-tiang pancang bagi keutuhan Indonesia sebagai negara kepu-

lauan dan negara kesatuan.

Kita harus membangun *trunk line* jalur pelayaran utama perdagangan antarpulau antara Belawan, Tanjung Priok Tanjung Perak Makasar dan Biak untuk memperkuat ekonomi domestik. Pelabuhan-pelabuhan kecil di sekitarnya membentuk *feeder line* ke pelabuhan-pelabuhan besar itu, maka lengkaplah jaringan perdagangan antarpulau Nusantara yang harus bebas dari kapal-kapal berbendera asing. Pada saatnya nanti kita kembangkan Sabang, Natuna Besar, Bitung dan Kupang, sebagai pusat-pusat perdagangan ke luar. Pulau-pulau Balerang dan Bintan kita siapkan untuk menyerap dan menetralsir Singapura. Kita harus menjadikan *inter island trade* sebagai basis pembangunan ekonomi kita sebagai Negara Kepulauan.

Berkembangnya perdagangan akan menumbuhkan industri dan beraneka ragamnya produk pertanian dan hasil laut, sehingga mengundang investasi baik domestik maupun asing, yang akan memperkuat posisi ekonomi domestik maupun dalam perdagangan internasional. Kita membangun ekonomi nasional dengan pondasi ekonomi domestik yang kuat di mana seluruh rakyat berperan serta dan ikut menikmati hasilnya dari Sabang sampai Merauke. Kita tidak per-

lu bermuluk-muluk tetapi semua upaya dan perhatian harus kita arahkan untuk membuat setiap rakyat mempunyai penghasilan yang cukup untuk makan, menyekolahkan anak dan menjaga kesehatan.

Apa Yang Harus Dilakukan Lembaga Pendidikan Tinggi

Lembaga pendidikan tinggi merupakan lembaga untuk membentuk kader-kader pemimpin bangsa. Oleh karena itu sasaran pendidikannya diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi bangsa dan negara, di samping memberikan bekal umum untuk memajukan dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Lembaga pendidikan adalah sebuah lembaga yang sangat dinamis karena harus selalu berpacu dengan perubahan, agar ilmu-ilmu yang diajarkan bukan ilmu-ilmu yang sudah kedaluwarsa.

Memasuki abad ke-21 telah membawa perubahan tersendiri dalam metoda berpikir, dari *ego-centric frame of reference* berubah menjadi *synergistic frame of reference*, dari *split perception* ke *whole seeing* Semua itu terjadi karena perkembangan masyarakat dunia dan teknologi semakin canggih dan kompleks sehingga berpikir dalam abad ke 21 harus *cre-*

actively adaptive. (Marsha Sinetar, *Developing a 21st Century Mind*, 1991).

Berkaitan dengan itu dan untuk menjawab tantangan masa depan bangsa dan negara Indonesia, dengan memperhatikan analisis-analisis di muka, yang mengarah kepada pemberdayaan sumber daya manusia Indonesia untuk mengatasi permasalahan yang kita hadapi, maka lembaga pendidikan tinggi kita harus mampu membekali para kader pemimpin bangsa dengan lima hal pokok yaitu: (1) memiliki jatidiri bangsa Indonesia yang percaya diri dan mampu mandiri dengan wawasan kebangsaan yang luas; (2) memiliki kemampuan bernalar atau *the ability to reason* yang luas untuk memecahkan semua permasa-

lahan bangsa dan negara secara komprehensif, sinergik sistemik dan integral; (3) memiliki daya kreasi, daya inovasi dan daya imajinasi yang tidak terbatas dengan landasan pikiran yang bebas dan jiwa yang merdeka; (4) memiliki kemampuan berwira usaha, kemampuan melihat peluang yang terbuka, serta berani memanfaatkan peluang yang terbuka dengan mengambil risiko secara bertanggung jawab dan (5) memiliki rasa cinta dan hormat kepada bangsa dan tanah air Indonesia yang tulus.

Semua itu ditempa di lembaga pendidikan tinggi bidang apapun baik eksakta maupun humaniora dan di mana pun lembaga tinggi itu berada, apapun statusnya, negeri atau swasta.